

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Front Polisario merupakan singkatan dari *Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Rio de Oro*, yang artinya “Front Populer untuk Pembebasan Saguia el-Hamra dan Rio de Oro”.<sup>1</sup> Polisario adalah kelompok yang mengklaim sebagai pemilik sah Sahara Barat atau Provinsi Sahara milik Kerajaan Maroko. Polisario didirikan di kamp Tindouf yang berada di kawasan baratdaya Aljazair dekat perbatasan dengan Maroko.<sup>2</sup>

Dewasa ini gerakan separatisme telah menjamur di beberapa negara, mulai dari polemik agama, masalah kebangsaan, perbedaan pandangan, perbedaan cara berfikir, bahkan yang paling parah adalah perbedaan kepentingan yang mengatasnamakan suatu perubahan sehingga menghalalkan berbagai cara dalam mencapai tujuan dari gerakan mereka. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Selain itu, separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok.<sup>3</sup>

Gerakan separatisme Front Polisario tersebut muncul di Sahara Barat, dimana Sahara Barat adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan merupakan salah satu negara yang memiliki lahan perikanan terbaik di dunia, namun Sahara Barat merupakan salah satu negara yang paling jarang dihuni

---

<sup>1</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Polisario>

<sup>2</sup><http://www.sahabatmaroko.com/news.php?id=485>

<sup>3</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Separatisme>

di dunia, bahkan beberapa data mencatat bahwa Sahara Barat merupakan negara yang paling rendah tingkat penduduknya.

Pada tahun 1957, wilayah Sahara Barat diklaim Maroko. Di sisi lain, pasukan Spanyol berhasil melakukan penyerangan terhadap militer Maroko dan membuat pasukan militer Maroko mundur. Pada tahun 1958, Spanyol secara resmi menyatukan Rio de Oro dan Saguia el-Hamra menjadi Provinsi Spanyol yang dikenal sebagai Spanyol Sahara. Namun, situasi semakin rumit dengan adanya klaim Mauritania yang baru merdeka pada tahun 1960. Pada tahun 1963, ditemukan cadangan fosfat dalam jumlah besar di Bu Craa (bagian utara Spanyol Sahara). Pertambangan fosfat di Bu Craa dimulai pada 1972, namun selama beberapa dekade telah terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh kekeringan dan dampak dari penemuan fosfat.

Hingga saat ini sebagian besar wilayah Sahara Barat dibawah kontrol Maroko yang terbagi menjadi beberapa provinsi dan dianggap sebagai bagian integral dari kerajaan. Pemerintah Republik Demokratik Arab Sahrawi memproklamkan diri sebagai bentuk partai tunggal dari sistem parlementer dan presidensial, akan tetapi menurut konstitusi, ini akan berubah menjadi sistem multipartai jika telah mencapai kemerdekaan.

Sahara Barat merupakan daerah koloni Spanyol antara tahun 1884-1976. Fakta secara hukum berdasarkan Resolusi 1514 (XV) tanggal 14 Desember tahun 1960 mengenai penyerahan kemerdekaan terhadap negara-negara koloni, Majelis Umum PBB (MU) mendesak Spanyol agar Sahara

Barat mendapatkan dekolonisasi dari Spanyol berdasarkan asas emnetukan nasib sendiri (*self-determination*). Spanyol menyetujui usulan referendum untuk mennetukan nasib Sahara Barat, dibawah pengawasan PBB Raja Hassan, kepala Negara Maroko melalui Menteri Luar Negerinya pada tanggal 30 September dan 2 Oktober 1974 menyampaikan pernyataan kepada Majelis Umum PBB bahwa dengan adanya suatu “*legalities*” antara Sahara Barat dan Maroko, maka Sahara Barat seharusnya menjadi bagian dari Maroko. Di sisi lain, dengan alasan yang sama Mauritania mengemukakan hal yang serupa.<sup>4</sup>

Atas desakan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, pada akhirnya Spanyol pun memberi kemerdekaan Sahara Barat melalui “Kesepakatan Madrid 1975”. Akan tetapi, Pasca penarikan militer Spanyol, Maroko langsung mengambil alih Saguia El-Hamra, sedangkan Mauritania mencaplok Rio De Oro, dimana keduanya merupakan wilayah Sahara Barat.

Pada tahun 1975, Mahkamah Internasional berpendapat bahwa tidak menemukan hubungan kedaulatan teritorial antara Sahara Barat dengan Maroko maupun Mauritania. Selain itu, Mahkamah Internasional juga menegaskan hak atas orang Sahrawi untuk berproses menentukan nasibnya sendiri. Hal inilah yang mendorong invasi Maroko dan Mauritania.

Pada tahun 1979, Mauritania mengundurkan diri. Akan tetapi, Maroko terus mengambil wilayah Sahara Barat. Pada tahun 1991, terjadi gencatan senjata yang ditengahi PBB. Dewan Keamanan PBB membentuk Misi PBB (MINURSO) untuk memantau gencatan senjata serta untuk

---

<sup>4</sup>Said Muchsin Alattas, Western Sahara, Analisis Yuridiksi Negara, <http://www.scribd.com/doc/86768174/Western-Sahara-Analisis-Yursdiksi-Negara>

menyelenggarakan suatu referendum bagi rakyat Sahara Barat agar memungkinkan mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Akan tetapi, referendum tersebut tidak pernah terwujud.

Dalam Perannya sebagai Sekretaris Pribadi Jendral PBB atas utusan Sahara Barat, mantan Menteri Luar Negeri AS James Baker III mengusulkan dua versi untuk solusi kompromi pada tahun 2000 dan 2003., dimana keduanya melibatkan referendum setelah periode otonomi. Rencana Baker ke 2 disahkan oleh PBB, namun tidak pernah dilaksanakan karena Maroko menolak untuk memungut suara.

Saat ini, Front Polisario masih mempertahankan posisinya dan terus memperjuangkan tujuannya hingga tercapai secara maksimal. Meskipun sebagai gerakan separatisme, Polisario cenderung memiliki stigma negatif baik di dalam negeri maupun luar negeri, namun keberadaannya diakui oleh PBB sebagai perwakilan dari Sahara Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu :

“Mengapa terjadi konflik di Sahara Barat dan bagaimana dinamika pergerakan Front Polisario tahun 2009-2014 ?”

### C. Landasan Teoritik

Untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi, dibutuhkan ketelitian dalam menganalisis serta penggunaan data yang sistematis dan relevan. Untuk menjawab dan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi di atas, maka dibutuhkan landasan teori dan konsep serta didukung oleh beberapa varian-varian ilmu pengetahuan lainnya. Untuk menjelaskan mengenai dinamika pergerakan Front Polisario di Sahara Barat, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu teori sebab-sebab konflik dan konsep gerakan sosial.

#### 1. Teori Deprivasi Relatif

Teori *Relative Deprivation* atau deprivasi relatif merupakan salah satu teori klasik gerakan sosial dan politik. Teori ini dianggap klasik dikarenakan lebih banyak menjelaskan gejala kolektif dari masyarakat agraris tradisional. Di sisi lain, teori *Relative Deprivation* banyak juga dipakai untuk menjelaskan gejala gersopol masyarakat petani, nelayan, dan masyarakat agraria lainnya. Dalam perkembangannya, kemudian teori ini banyak dipakai untuk menjelaskan gejala *crowd* di perkotaan : menjelaskan gerakan buruh, mahasiswa, dan masyarakat lainnya yang sedang mengalami kekecewaan terhadap realita yang ada.<sup>5</sup>

Kaitannya dengan teori ini yaitu ketika dalam suatu masyarakat terjadi suatu kesenjangan antara nilai yang diharapkan dengan nilai kapabilitas untuk menggapai harapan, maka masyarakat yang bersangkutan

---

<sup>5</sup> Meyrza Ashrie Tristyana, *Definisi, Konsep, dan Teori Gerakan Sosial Politik*. Dapat dilihat di situs <http://www.scribd.com/doc/69071644/Definisi-Konsep-dan-Teori-Gerakan-Sosial-Politik#scribd>

akan mengalami kekecewaan dan frustrasi. Kondisi inilah yang akan memunculkan tindakan melawan ataupun memberontak. Semakin besar tingkat kesenjangan yang terjadi, maka semakin besar pula kemungkinan munculnya tindakan melawan dan memberontak tersebut. Kesenjangan inilah yang menimbulkan timbulnya aksi-aksi massa.

Dalam bukunya *Why Men Rebel* oleh **Ted Robert Gurr**, mengklarifikasikan Teori Deprivasi Relatif ke dalam tiga bagian utama, yakni<sup>6</sup> :

#### *1. Decremental Deprivation*

“Decremental Deprivation” menunjukkan kondisi dalam nilai yang diharapkan yang terdapat di masyarakat dalam keadaan stabil, sementara pada keadaan yang bersamaan, nilai kapabilitas justru mengalami penurunan. Akibatnya kesenjangan yang ditimbulkan dengan menurunnya nilai kapabilitas menurut konsep ini akan menimbulkan perasaan kecewa dan frustrasi. Perasaan semacam inilah yang pada gilirannya mampu berfungsi sebagai pangkal tolak bagi munculnya tindakan “melawan” atau “memberontak”.

#### *2. Aspiration Deprivation*

Menunjukkan kondisi dimana nilai yang diharapkan mengalami peningkatan, sementara pada saat yang bersamaan nilai kapabilitas berada dalam keadaan statis tak berubah. Kesenjangan yang disebabkan naiknya harapan sementara kemampuan untuk mewujudkan harapan tersebut dalam

---

<sup>6</sup> Ibid.

keadaan tidak berubah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gurr menjadi penyebab munculnya perasaan kecewa dan frustrasi. Dalam kondisi seperti ini, tindakan melawan atau memberontak dapat muncul ke permukaan.

### 3. *Progressive Deprivation*

Menunjukkan suatu kondisi dimana nilai-nilai yang diharapkan yang terdapat di dalam suatu masyarakat mengalami kenaikan antara kedua nilai ini untuk sementara waktu memang masih bisa ditoleransi (berlangsung). Akan tetapi pada waktu tertentu dimana nilai yang diharapkan masih mengalami kenaikan, maka nilai kapabilitas berhenti proses kenaikannya dan justru cenderung bergerak menurun. Adanya kenaikan nilai yang diharapkan secara kontinyu, dan berhentinya proses kenaikan nilai kapabilitas yang disusul dengan gerak menurun, akan menimbulkan kesenjangan yang pada gilirannya dapat juga melahirkan perasaan kecewa atau frustrasi. Kondisi seperti ini, sebagaimana dua konsep deprivasi sebelumnya, juga dapat menimbulkan tindakan melawan atau memberontak.

Bagi **Ted Gurr**, kekerasan terjadi ketika masyarakat akan marah apabila terjadi perampasan. Orang cenderung akan memberontak, jika ia merasa sesuatu yang di harganya dirampas. Rasa dirampas inilah yang disebut dengan *relative deprivation*. Perasaan ini muncul akibat tidak sesuainya keinginan dengan kemampuan mencapai apa yang diinginkan. Kemampuan untuk mencapai keinginan dirasakan ada, tetapi upaya

mencapainya dihambat atau digagalkan. Kondisi inilah yang menimbulkan rasa dirampas.

Keterkaitan teori deprivasi relatif yang dikemukakan oleh **Ted Rober Gurr** dengan gerakan Front Polisario dengan Pemerintah Maroko dikarenakan tindakan represif pemerintah Maroko mengklaim kepemilikan Sahara Barat dan menduduki wilayah Sahara Barat dengan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Sehingga masyarakat Sahara Barat tidak dapat menikmati hasil dari sumber daya alam yang mereka miliki. Hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari gerakan Front Polisario dengan Pemerintah Maroko yang semakin memanas karena masyarakat Sahara Barat pada dasarnya anti-kolonial.

## 2. Teori Sebab - Sebab Konflik

Menurut teori **Johan Galtung** dalam upaya memahami lahirnya konflik memperkenalkan sebuah teori sederhana. Teori ini mengasumsikan bahwa konflik dalam dimensi *Attitude (A)*, *Behavior(B)* dan *Contradiction (C)* yang membentuk konflik.<sup>7</sup> Penulis akan memaparkan pengertian dari konflik terlebih dahulu, Menurut **Johan Galtung** konflik adalah kondisi ketidaksesuaian/kontradiksi antara beberapa pihak yang berbeda kepentingan (tujuan).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Rosdiana Ruslan. 2010. Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Sahara Barat (2005-2007) (Studi Kasus Front Polisario dan Maroko) dalam Johan Galtung, *Teori abc*. (akses pada tanggal, 27 Oktober 2010)

<sup>8</sup>Rosdiana Ruslan. 2010. Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Sahara Barat (2005-2007) (Studi Kasus Front Polisario dan Maroko) dalam <http://www.teorikonflik.com> yang diunduh 27 Oktober 2010



Pengertian dari *Attitude* yaitu dimana konflik cenderung diawali dengan performa sikap dalam memandang pihak lain. Pihak lain diyakini sebagai “pengganggu” kepentingan yang akan merusak pencapaian tujuan kelompok tertentu. Kemudian dalam pandangan psikologi sosial, *behavior* merupakan bentuk aksi dari sikap mental seseorang dalam merespon sesuatu.

Menurut **Wirawan**, konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang keterbatasan sumber. *Pertama*, Manusia selalu mengalami keterbatasan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kehidupannya, keterbatasan tersebut menimbulkan kompetisi satu sama lain untuk mendapatkan sumber yang diperlukan sehingga seringkali menimbulkan konflik. *Kedua*, komunikasi yang kurang baik. Hal inilah yang sering kali menimbulkan konflik dalam organisasi, misalnya distorsi informasi yang tidak tersedia dengan bebas dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. *Ketiga*, kebutuhan. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau memiliki kebutuhan yang sama namun terbatas akan jumlahnya. Sehingga kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia, apabila kebutuhan manusia diabaikan atau terhambat, maka hal ini bisa memicu terjadinya konflik. *Keempat*, sistem imbalan yang tidak layak. Konflik yang terjadi karena adanya sistem imbalan yang dianggap tidak adil atau layak oleh karyawan dalam perusahaan. *Kelima*, tujuan yang berbeda. Konflik

terjadi karena adanya tujuan yang berbeda-beda diantara pihak-pihak yang terlibat konflik.<sup>9</sup>

Menurut sosiolog, teori sebab-sebab konflik terdiri dari : (1) Teori hubungan masyarakat, teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan masyarakat dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. (2) Teori negosiasi prinsip, teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi disebabkan adanya posisi-posisi para pihak yang tidak sesuai dan banyak perbedaan-perbedaan diantara para pihak. (3) Teori identitas, teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa bahwa keberadaannya atau identitasnya terancam oleh pihak-pihak lain. (4) Teori kesalahpahaman, teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidaksesuaian dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari hal budaya, kepentingan dan nilai-nilai. (5) Teori transformasi, teori menjelaskan bahwa konflik terjadi secara struktural dan sistematis dengan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang diwujudkan dalam hal persaingan ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, agama, dan politik. (6) Teori kebutuhan dasar manusia, teori ini menjelaskan bahwa terjadinya konflik disebabkan karena kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi secara keseluruhan atau terhalangi atau dihalangi oleh pihak lain.

---

<sup>9</sup>Christanto Djefry Saekono. 2013. *“Studi Tentang Sebab dan Dampak Konflik Pemilikan Tanah di Kabupaten Mesuji Terhadap Masyarakat Sekitarnya”* dalam buku Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik; Teori, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010), hal 8-13.

Menurut teori ini kebutuhan manusia ada tiga jenis, yaitu pertama, substantif (*substantive*) berupa uang, pangan, rumah dan sandang, kedua, prosedural (*procedural*) yang merupakan kebutuhan berhubungan dengan tata cara mengenai pergaulan dalam masyarakat, Ketiga, psikologis adalah kebutuhan yang berhubungan dengan non-materiil, seperti pengakuan, penghargaan. Sehingga disimpulkan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari fisik, psikologi, sosial dan spiritual. Setelah memahami beberapa teori diatas, dari semua teori mengenai sebab-sebab konflik saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain dan berguna untuk menjelaskan fenomena dan penyebab konflik yang terjadi dalam masyarakat saat ini.<sup>10</sup>

**Dean G. Pruitt** dan **Jeffrey Z. Rubin** dalam buku “Teori Konflik Sosial” menyatakan bahwa *konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (bersamaan).*<sup>11</sup>

Konflik yang terus menerus memanas dapat berubah menjadi sebuah kekerasan. Demikian pula apa yang terjadi dalam konflik Front Polisario di Sahara Barat. Konflik yang bermula karena wilayah berubah menjadi kekerasan seperti pembunuhan, penculikan, penahanan.

---

<sup>10</sup>Christanto Djefry Saekono. 2013. “Studi Tentang Sebab dan Dampak Konflik Pemilikan Tanah di Kabupaten Mesuji Terhadap Masyarakat Sekitarnya” dalam buku Simon Fisher, et.al., *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, alih Bahasa oleh S.N. Karikasari (Jakarta: Zed Books, British Council, 2001, 8-9; Christopher W.Moore, *Mediation Process Practical Strategies For Resolving Conflict*, 2nd edition, (San Francisco: Jossey-Bass, 1996), hal 63-65.

<sup>11</sup>Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004. hal 9

Kekerasan adalah segala tindakan, perkataan sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kekerasan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan dan menghalangi seseorang untuk meraih potensi secara penuh. Konflik dan kekerasan merupakan dua hal yang berbeda meskipun sebagian orang mengatakan bahwa keduanya adalah sama, karena setiap terjadinya konflik pasti menimbulkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai.

Konflik berubah menjadi kekerasan ditandai oleh indikator-indikator sebagai berikut :

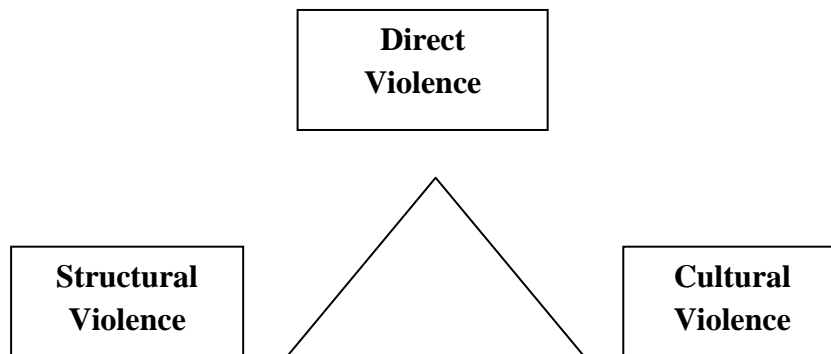
1. Peningkatan kasus-kasus pelecehan oleh suatu kelompok terhadap pihak lain atau oleh polisi terhadap komunitas tertentu.
2. Peningkatan insiden-insiden kekerasan, bahkan insiden kecil.
3. Peningkatan insiden-insiden konflik publik, misalnya di tempat-tempat umum.
4. Adanya kelompok yang tidak berkomunikasi dengan anggota masyarakat yang lain, apakah karena masyarakat mengucilkan mereka atau mereka memang menolak untuk berinteraksi.
5. Ekspresi keluhan yang diulang-ulang oleh kelompok yang sama, yang tampaknya tidak didengar atau ditanggapi.
6. Kurangnya kepercayaan terhadap struktur-struktur yang mendukung keadilan atau keamanan - modern atau tradisional – ditunjukkan oleh keengganan untuk memanfaatkan struktur-struktur ini dan lebih menyukai main hakim sendiri, seperti balas dendam.

7. Ketegangan sosial dan politik : Kepercayaan dan keengganan diantara pihak-pihak dalam situasi ini dapat ditunjukkan dalam berbagai perilaku yang mengindikasikan bahwa satu pihak merasa tersakiti atau dirugikan.
8. Kurangnya perwakilan : masyarakat ingin merasa terwakili oleh orang yang mereka telah pilih sendiri. Jika ada kelompok yang merasa kurang terwakili, setiap usaha untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok itu dengan mudah akan memperburuk konflik.
9. Kepentingan pembangunan : Perwakilan-perwakilan pemerintah dan kelompok masyarakat perlu memastikan sedapat mungkin bahwa pembangunan menjangkau semua lapisan masyarakat. Pembagian sumber daya yang tidak merata akan menyulut konflik, memperkuat rasa ketidakadilan atau keluhan kelompok masyarakat tertentu.

### **3. Triangle Violence**

Pada dasarnya kekerasan merupakan salah satu pendekatan untuk memahami konflik. Sebuah konflik yang berujung dengan kekerasan biasanya dikarenakan adanya ketimpangan kekuasaan antara dua belah pihak yang berseteru. Johan Galtung menggambarkan bentuk-bentuk

kekerasan yang saling berhubungan dalam “*Direct- Structural- Cultural Violence Triangle*” dan sering menyertai konflik yang terjadi.<sup>12</sup>



Gambar 1.1 : Direct- Structural- Cultural Violence Triangle, dari Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means*, 1996

- a. **Direct Violence** merupakan bentuk kekerasan secara langsung dan dapat dirasakan secara fisik. Direct violence sangat mudah dikenali pada saat terjadinya konflik atau perang yaitu adanya pembunuhan, pemerkosaan, intimidasi, penyiksaan atau pengrusakan.
- b. **Structural violence** merupakan bentuk kekerasan yang sulit untuk dikenali karena kekerasan ini secara tidak langsung dihasilkan oleh sistem dalam masyarakat, seperti sistem sosial, sistem ekonomi, atau sistem politik. Structural violence terjadi karena pembagian sumber daya, barang, kesempatan, antar kelompok berbeda secara tidak merata. Bentuknya

---

<sup>12</sup>Waris Lestyo Handanu.2010.*Dinamika konflik politik Zimbabwe 2008-2009* dalam Johan Galtung, *Peace by Peacefull Means*, (Oslo: International Peace Research Institute, 1996), hal 2

biasanya berupa diskriminasi, kemiskinan, penyangkalan hak dan kemerdekaan.

- c. **Cultural violence**, di satu sisi bisa merupakan budaya yang melegitimasi atau menganggap kekerasan adalah suatu hal yang wajar. Di sisi lain, cultural violence dapat berarti bagaimana suatu masyarakat melihat diri mereka dalam berhubungan dengan masyarakat lain dalam dunia yang luas. Kekerasan ini dapat berbentuk keinginan untuk menguasai kekuasaan orang lain, sifat etnosentris yang berlebihan, tindakan menghancurkan atau memusnahkan bangsa lain.

#### 4. Konsep Gerakan Sosial

**Giddens** (1993) menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau gerakan untuk mencapaitujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.<sup>13</sup>

Sedangkan **Sidney Tarrow** menempatkan Gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuasaan untuk melawan para elit , pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Sehingga ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan diagungkan oleh resonansi kultural serta simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan dan hasilnya adalah Gerakan Sosial. Gerakan sosial dapat beroperasi

---

<sup>13</sup>Suharko, (2006), *Gerakan Sosial Konsep, Startegi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan sosial di Indonesia*, Malang: Averros Press. Hlm 1-3

dalam batas-batas legalitas suatu masyarakat, akan tetapi bisa juga bergerak secara ilegal atau sebagai kelompok ‘bawah tanah’ (*underground groups*). Gerakan sosial berbeda dengan organisasi sosial, perbedaannya yaitu Gerakan sosial biasanya memiliki karakteristik birokratis. Karena itu, gerakan sosial secara gradual dapat berubah menjadi organisasi formal, sementara itu sangat jarang suatu organisasi formal berubah menjadi gerakan sosial. Selain itu, gerakan sosial juga berbeda dengan kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) yaitu suatu asosiasi yang dibentuk untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam cara yang menguntungkan para anggota-anggotanya.<sup>14</sup>

#### **D. Hipotesa**

Dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan serta kerangka dasar teori dan konsep yang telah digunakan diatas, maka dapat diambil hipotesa sementara bahwa :

1. Front Polisario cenderung berkonflik karena adanya faktor ekonomi. Selain itu, juga adanya faktor politik, diantaranya geopolitik leverage yang melekat diantara Maroko & Sahara Barat, kepentingan politik Amerika Serikat, serta persaingan politik antara Maroko & Aljazair.
2. Konflik Polisario di Sahara Barat hingga saat ini masih terus memperjuangkan tujuannya untuk kemerdekaan Sahara Barat. Selain itu, masih dilakukan proses perundingan antara Front Polisario dengan pihak

---

<sup>14</sup>Ibid



Maroko yang ditengahi oleh PBB. Konflik kini belum terselesaikan dikarenakan adanya banyak aktor yang mengintervensi.

### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai beberapa tujuan :

1. Menjabarkan (deskriptif) mengenai dinamika pergerakan Front Polisario di Sahara Barat.
2. Mengetahui penyebab terjadinya konflik serta melihat kemungkinan keterlibatan banyak aktor (pemerintah Maroko, Aljazair, Amerika Serikat) dalam pergerakan Front Polisario.

Di samping itu juga, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memenuhi Tugas Akhir (TA) dalam menyelesaikan Program Strata I pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **F. Jangkauan Penelitian**

Sesuai dengan tema dan melihat permasalahan yang ada, maka pembahasan skripsi ini difokuskan pada dinamika pergerakan Front Polisario, dimana penulis menggunakan beberapa jangkauan atau ruang lingkup agar lebih terarah, yaitu sebab-sebab munculnya Front Polisario, perkembangan gerakan tersebut pada tahun 2009 hingga perjuangannya dalam menolak invansi pemerintah Maroko pada tahun 2014. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya pengambilan data yang terdapat di luar batas

tahun yang telah ditetapkan apabila diperlukan dan terdapat relevansinya dengan penelitian ini.

### **G. Metode pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisa kualitatif, dalam artian mengumpulkan data dan informasi melalui studi pustaka, dari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku literatur yang relevan dengan objek studi yang diteliti, jurnal-jurnal ilmiah yang reviewnya terkait dengan studi ini, artikel-artikel ilmiah yang diambil dari bermacam situs di internet dan catatan-catatan lainnya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan fasilitas perpustakaan, sehingga data-data yang dikumpulkan bersifat sekunder.

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab dan pembahasan dalam tiap bab akan dijabarkan lebih rinci kedalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam Bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga pada akhirnya nanti akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis.

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I** berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan

**BAB II** berisi tentang profil pergerakan Front Polisario yang terdiri dari Aspek Geografis dan Kependudukan Sahara Barat, Sejarah Pergerakan Front Polisario, Tujuan Gerakan Front Polisario, Simbol dan Karakteristik Gerakan Front Polisario serta Jaringan dan Dukungan Gerakan Front Polisario

**BAB III** berisi tentang Konflik Polisario yang terdiri dari Sejarah Konflik Polisario, Pengakuan Maroko Terhadap Wilayah Sahara Barat (Faktor Pendukung Maroko Menguasai Sahara Barat, Kepentingan Maroko, Dampak Invansi Maroko, Negara Pendukung Maroko) dan Perlawanan Front Polisario Terhadap Maroko

**BAB IV** berisi tentang Dinamika Sosial-Politik pergerakan Front Polisario yang terdiri dari Awal Mula Konflik, Sejarah Konflik Polisario, Penyebab Konflik Front Polisario (faktor ekonomi dan faktor politik), Intervensi pihak Asing ( Amerika Serikat, Islandia, Norwegia, Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) dan European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC) ) dan Perkembangan Kontemporer Gerakan Front Polisario.

**BAB V** berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman-rangkuman dari penjelasan –penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dari BAB II hingga BAB IV, sekaligus merupakan penutup dalam skripsi ini.